BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara global, Sehumpeter mengatakan bahwa demokrasi ialah kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Politik Etnik merupakan pemanfaatan manusia secara politis dengan mengutamakan satu kelompok karena persamaan pola yang termaksud ras, etnis, gender dan agama. Politik seperti ini selalu di gunakan di masa lalu. Sebagai contoh Adolf Hitler yang meyakini orang Jerman bahwa sumber krisis ekonomi dan kekalahan perang dunia ialah karena pengaruh orang Yahudi.[1]

Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka Bumi yang berupa fakta, dunia nyata, baik bentuk permukaan buminya maupun sumberdaya alamnya, berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka Bumi yang disajikan.[2] Politik yaitu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Kemudian etnik atau suku merupakan suatu kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa. Istilah etnik digunakan untuk mengarah pada suatu kelompok atau kategori sosial yang perbedaannya terletak pada kriteria kebudayaan.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Kemudian dengan janji-janji manis untuk membesarkan Jerman pada waktu itu, Hitler bersama partainya berhasil memenangkan pemilu tahun 1932. Di

---

[1] Zahrotunnimah, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, (Magelang: Portal Garuda,2014), hlm. 2. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022

[2]BAPPEDA. Tentang Peta dan Pemetaan. https://www.bappeda.grobogan.go.id/berita/serba-serbi/112-tentang-peta-dan-pemetaan. Diakses pada tanggal 02 Maret 2022

[3]Http://repository.uma.ic.id/bitstream/123456789/563/5/118600169_file5.pdf. dikutip pada tanggal 12/02/2022 pukul 20:41 wib.

Indonesia politik etnik terkait pada etnisitas, agama, ideologidan kepentingan-kepentingan lokal yang mewakili umumnya oleh para elit politik dengan aktulturasinya masing-masing. Pemekaran daerah atau pegantian kekuasaan pemerintah dengan menjadikan pola politik etnik sebagai salah satu alat politiknya. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik, sehingga banyak di pengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak mudah di jelaskan.[4]

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Aceh Tenggara di huni oleh berbagai macam suku, salah satu suku yang sangat mendominasi adalah suku Alas. Di daerah suku Alas memiliki alasan tersendiri dalam membuat istilah penamaan etnik, karena suku Alas menganggap penting dalam membuat istilah nama etnik. Penamaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengungkapkan keinginan serta harapan sebagai gambaran hasil diskusi masyarakat.

Setiap komunikasi manusia saling menyampaikan informasi yang dapat berupa pikiran, gagasan, maksud perasaan, maupun emosi secara langsung. Namunterkadang dari bahasa juga sering menyangkut pada masalah atau konflik antar masyarakat. Seperti yang terjadi di daerah Aceh sebelumnya. Konflik tersebut di lihat dari hasil penelitian Abdullah di Aceh,[5] konflik telah bergejolak sejak awal kemerdekaan bangsa ini.Misalnya, konflik horizontal yang melibatkan lapisan masyarakat ningrat dengan kelompok sosial-politik lainnya.Kemudian pemberontakan Darul Islam, perlawanan terhadap kekuatan komunis, dan terakhir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[4] Zahrotunnimah, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan,…, hlm. 2.

[5] J, Iskandar. Menuju Hidup Sehat dan Awet Muda melalui Pencegahan dan Pengobatan. Buana Ilmu Populer : Jakarta

konflik antara GAM dan pemerintah.Berdimensi masyarakat Aceh mengusir para transmigran yang telah menentap sekian tahun dan bertani di Aceh.[6]

Keberagaman, ideologi, politik, etnik dan tata karma, kesenjangan ekonomi kemudian kesenjangan sosial perlu dipahami sehingga tidak memberi dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.Hal ini penting karena mengingat kasus-kasus negatif yang sudah banyak menjadikan anak-anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Wihyanti menjelaskan bahwa keberadaan etnik di Indonesia secara nyata tidak hanya menghuni di masing-masing pulau tetapi juga menjadi penduduk di pulau lainnya. Demikian sama halnya dengan keberadaan etnik di daerah Aceh Tenggara. Yang memiliki berbagai macam etnik. Maka tujuan mengambil judul Pemetaan Politik Etnik Masyarakat Aceh Tenggara karena ingin mengetahui kesamaan hak dalam berpolitik setiap suku yang ada di Aceh Tenggara tersebut.[7]

Konflik antara Aceh dengan pemerintahan pusat pasca kemerdekaan Indonesia mereda. Dengan diberikan hak khusus oleh pemerintah pusat untuk Aceh berupa otonomi dalam bidang sagama, adat, dan pendidikan.Sehingga gencatan senjata berhasil dilakukan pada 1957-1959. Diplomasi mencarialternatif terbaik dalam mengakhiri konflik yang terjadi antar kelompok untukmencapai perdamaian dari suatu kesepakatan yang telah disepakati bersama. Merujuk pada perdamaian yang tercapai pada era T. Daud Beureueh dengan pemerintah pusat. Maka Nota Kesepahaman atau MoU (Memorandum of understanding) yang di laksanakan pada 15 Agustus 2005 berlokasi di Helsinki, Finlandia menjadi akhir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[6] Abdullah, Piter dkk., 2002. Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya Di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.

[7] Irma Novia, Istilah Penaman Etnik Suku Alas, (Kutacane: STKIP Usman Safri Kutcane, 2021) hlm. 78-79

dari konflik yang terjadi antara Aceh dan pemerintah pusat yang di mulai sejak 04 Desember 1976 di bawah kepemimpinan Hasan Tiro. Perundingan antara Indonesia dan GAM di fasilitasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia dan menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur Crisis Managemt Initiative (CMI). Perundingan ini menghasilkan Memorandum of understanding (MoU) yang memberikan keleluasaan bagi Aceh untuk beberapa hal, yaitu: Pertama, Aceh memiliki identitas kultural dengan penerapan Syari'at Islam dan Lembaga Wali Nanggroe. Kedua, Aceh mendapat keadilan ekonomi yaitu pembagian hasil minyak bumi dan gas sebesar 70%. Ketiga, rakyat Aceh mendapatkan hak politiknya melalui pembendukan partai politik lokal (Parlok). Ketiga poin tersebut yang kemudian di atur dalam Undang- Undang No 11 2006 Tentang Pemerintah Aceh.[8]

Terdapat permasalahan seperti, keinginan kawasan Lintas Timur, Lintas Tengah dan Lintas Barat agar dapat di lakukan pemekaran Kabupaten di Provinsi Aceh. Dinamika politik di Aceh menjadi pendorong tumbuh kembangnya demokrasi. Untuk itu di katakana penelitan ini sangat penting untuk mengetahui dinamika politik etnik, berupa situasi politik yang terjadi dan dampak terhadap masyarakat di Aceh Tenggara.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Menurut Saddam Husein pengamat politik lokal Aceh, keberadaan partai politik lokal di Aceh akan mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan daerah lebih baik. Partai politik lokal tersebut di harapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi dan sebagai representatif masyarakat secara lebih tepat. Mengingat beragamnya kepentingan yang di miliki oleh rakyat Indonesia.

[8] Majalah Aceh Kitta. Agustus 2005

[9] Usman, Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian Di Aceh, (Kutacane: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017). hlm. 10-11

Partai politik lokal telah menjadi instrumen utama rakyat Aceh untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik. Serta di gunakan dalam memberikan pengaruh yang kuat dalam proses formulasi kebijakan-kebijakan publik yang mana selama ini di anggap kurang produktif. Dalam pembangunan di Aceh, khususnya Aceh pasca konflik yang masih di kategorikan jauh ketinggalan dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Dari uraian penjelasan ini, penulis ingin mengetahui politik etnik masyarakat di Aceh tenggara dan apa dampak yang timbul dari pola politik etnik tersebut. Sehingga menurut penulis perlu di bedah bagaimana sebenarnya pemetaan politik etnik pada masyarakat di Aceh Tenggara tersebut. Kedepannya agar kiranya semua etnik yang ada di Aceh Tenggara ini memiliki hak yang sama dalam berpolitik, guna menghilangkan batasan sosial antar golongan sehingga terwujudnya politik yang sehat di Aceh Tenggara itu sendiri.[10]

Jadi inilah yang menjadi persoalan sehingga tulisan ini di anggap penting untuk menambah bahanbacaan dan pemahaman dalam pola politik etnik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahn dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Bagaimana Pemetaan Politik Etnik masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari Politik Etnik tersebut?

[10] Mustapa Kamil Alga Beruh, Social Trust Masyarakat Aceh Tenggara Terhadap PartaiAceh, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019). hlm. 15-16.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pemetaaan politik etnik masyarakat suku Alas di Aceh Tenggara khusus nya Desa Pulonas.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari politik etnik ini di Aceh Tenggara khusus nya Desa Pulonas

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka di harapkan hasil penelitian ini memeiliki beberapa kegunaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pengetahuan mengenai pemetaan politik secara umum.
2. Sebagai bahan pengetahuan mengenai pemetaan politik masyarakat etnik di Aceh Tenggara.

E. Batasan Istilah

Untuk memberikan persamaan persepsi antara pembaca dan penulis, dan untuk menghindari dari kesalahpahaman di antara pokok-pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut, maka di buatlah batasan dari istilah tersebut, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Pemetaan.

   Pemetaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membuat peta.Secara Istilah Pemetaan adalah suatu proses menyajikan informasi muka Bumi yang berupa fakta, dunia nyata, baik bentuk permukaan buminya maupun sumberdaya alamnya, berdasarkan skala peta, sistem proyeksi peta, serta simbol-simbol dari unsur muka Bumi yang disajikan.

2. Politik

   Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintah atau dasar pemerintahan.Secara istilah politik adalah kegiatan yang di arahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.

3. Etnik

   Etnik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang memiliki arti atau kedudukan tertentu karena keurunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya. Etnik secara istilah merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat di bedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan, terutama bahasa.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sangat menentukan berhasilnya maksud dan tujuan dari sebuah penelitian. Maka untuk memperoleh bahan dan informasi yang akurat dalam membahas Skripsi ini di gunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah Kualitatif. Penelitian yang di lakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi, serta data-data tertulis yang berkenaan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian, penulisan memilih di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Desa Pulonas merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara, di Desa Pulonas didominasi masyarakat

yang berasal dari suku Alas, dikarenakan pada masa lampau Desa Pulonas merupakan Pusat Kerajaan Selian pada masanya.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan ada dua jenis, yaitu: Sumber Primer, yang merupakan data utama yang penulis dapatkan langsung dari masyarakat di daerah Aceh Tenggara. Kemudian Sumber Sekunder, merupakan data pendukung yang di gunakan dalam penelitian ini berupa data yang dapat dari buku-buku ataupun jurnal yang barkaitan tentang penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, bertujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai hal yang di teliti dengan penulis. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, dokumentasi dan kuesioner.

5. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian akan di simpulkan dalam deskripsi sebagai hasil penelitian. Selanjutnya di buat pemeriksaan kesimpulan, proses ini bertujuan untuk tinjauan umum terhadap seluruh data yang sudah di kumpulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

G. Kajian Terdahulu

1. Buku yang berjudul “Buletin Hukum dan Keadilan” buku ini di tulis oleh Zahrotunnimah, pada tahun terbit 2014 yang di terbitkan di Magelang oleh Portal Garuda. Buku tersebut membahasa tentang bagaimana pola politik 17 etnik tersebut. Didalam buku tersebut ia mengatakan Politik Etnik merupakan pemanfaatan manusiasecara politis dengan mengutamakan satu kelompok karena persamaan pola yang termaksud ras, etnis, gender dan agama.

2. Jurnal “Istilah Penamaan Etnik Suku Alas” yang di tulis oleh Irma Novia pada tahun 2021 dan di terbitkan oleh STKIP Usman Safri Kutacane. Jurnal tersebut membahas tentang penamaan istilah etnik suku Alas dan membahas tentang keadaan etnik di daerah Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa budaya yang ada di daerah suku Alas di namai dengan beberapa istilah, seperti: Pemamanan, Landok Alun, Mesekat, Pelebat, dan Empuh. Ditinjau dari sosiolinguisik diketahui bahwa, istilah-istilah tersebut mengacu pada Budaya terdahulu yang masih tetap diestarikan.

3. Jurnal “Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian Di Aceh” di tulis oleh Usman pada tahun 2017 dan di terbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama. Jurnal tersebut membahas tentang pola politik dan dinamika politik di kawasan Aceh.

4. Skripsi “Social Trust Masyarakat Aceh Tenggara Terhadap Partai Aceh” di tulis oleh Mustapa Kamil Alga Beruh pada tahun 2019 dan di terbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang keadaan dan pemikiran masyarakat tentang politik di kawasan Aceh Tenggara.

H. Sistematika Pembahasan

Keseluruan laporan penelitian ini di susun dalam lima bab, yakni:

BAB I, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan gambaran umum Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, terdiri dari sejarah Desa Pulonas,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, letak geografis, keadaan sosial dan ekonomi, keadaan pemerintah, dan keadaan keagamaan.

BAB III, perspektif dan pengertian politik etnik secara umum maupun menurut agama Islam, serta memaparkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk politik etnik dan penyebab terjadinya politik etnik disuatu daerah.

BAB IV, Pembahasan hasil penelitian. Bab keempat menjelakaskan hasil penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti hasil yang diteliti bagaimana pemetaan politik etnik yang terjadi di Aceh Tenggara khususnya Desa Pulonas mengunakan Metode kualitatif. penelitian tersebut mengunakan wawancara dan dokumentasi.

BAB V, Bagian yang memuat kesimpulan dalam hasil penelitian dalam pembuatan skripsi, kritik dalam penyelesaikan skrisi dan saran sebagai menjadikan pondasi dalam penyempurnaan penelitian dalam skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN